

BAB II

PAPUA, ISU SEPARATISME DAN KETERLIBATAN AUSTRALIA

Pada bab ini akan dijelaskan tentang keadaan geografi dan demografi Papua, yang dilanjutkan dengan dinamika gerakan separatis Papua dimana faktor kondisi geografi Papua khususnya dan geografi Indonesia pada umumnya yang terbuka, akan mempengaruhi dinamika gerakan separatis Papua. Separatisme merupakan ancaman utama terhadap keutuhan NKRI. Ancaman separatisme di Indonesia tidak selalu berbentuk gerakan bersenjata, melainkan dapat juga berupa gerakan politik. Keterbukaan geografi Indonesia sangat rawan terhadap adanya infiltrasi pihak asing, yang banyak dimainkan oleh Australia sebagai negara tetangga terdekat Indonesia.

Sebelum memulai pembahasan, lebih dahulu dijelaskan kajian geopolitik yang menggaris bawahi tentang adanya hubungan kausalitas antara dimensi geografi yang terbuka dengan infiltrasi pihak asing. Contoh tentang kajian tersebut adalah tulisan dari Audrey dan Kahin (1997) yang menjelaskan tentang keterlibatan AS pada pemberontakan daerah PRRI di Sumatera. Kahin mengungkap adanya keterlibatan pihak asing (CIA) dalam eskalasi pemberontakan PRRI di Sumatera, AS pada waktu itu mengirim kapal selam yang berisi ratusan senjata dan amunisi melalui pelabuhan Panginan (sekitar 35 mil dari Padang). Ini menjadi bukti bahwa karakteristik Indonesia yang memiliki geografi terbuka akan dengan mudah terinfiltrasi pihak asing. Lebih lanjut, Grygiel (2006) menyebutkan bahwa geografi merupakan sebuah variabel kunci yang membentuk strategi utama dari suatu negara.³⁶

Berdasar pada definisi diatas, maka pembahasan bab ini akan mencakup: *Pertama*, deskripsi geografi, demografi dan topografi Papua. *Kedua*, dinamika gerakan separatis Papua pada era Orde Baru dan era Reformasi. *Ketiga*, eskalasi gerakan separatisme Papua dan *keempat*, nilai strategis Papua bagi Australia serta dimensi keterlibatan Australia dalam isu separatis Papua.

³⁶ Jakub J. Grygiel, *Great Powers and Geopolitical Change*, (Maryland, The Johns Hopkins University Press, 2006), h.18

2.1 Deskripsi Papua

2.1.1 Geografi

Papua adalah sebuah pulau yang terletak di sebelah utara Australia dan merupakan wilayah timur Indonesia. Sebagian besar daratan Papua masih hutan belantara. Papua merupakan pulau terbesar kedua setelah Greenland. Sekitar 47% wilayah pulau Papua merupakan bagian dari Indonesia.

Papua yang berada di bagian paling timur Indonesia ini berbatasan dengan Samudera Pasifik di Utara serta Provinsi Maluku dan Maluku Utara, pada bagian selatan Papua berbatasan dengan selat Torres yang termasuk dalam wilayah Australia, di sebelah barat berbatasan dengan Laut Arafuru dan Laut Seram, sedang di bagian timur berbatasan langsung dengan negara Papua New Guinea.

Wilayah Papua membentang dari barat ke timur sejauh kurang lebih 1200 km (dari Sorong hingga Jayapura) dan sekitar 736 km dari utara ke selatan (dari Jayapura sampai Merauke). Papua memiliki luas wilayah sebesar 644.981 km², terdiri atas 421.981 km² daratan dan 228.000 km² wilayah laut. Keseluruhan luas pulau Papua (wilayah Indonesia dan Papua New Guinea) menduduki peringkat kedua pulau terbesar di dunia setelah pulau Greenland (Denmark).

Papua juga dilalui oleh tiga deretan pegunungan yaitu; deretan Pegunungan Utara, yang merupakan *outer arc* (lingkar luar), deretan pegunungan yang merupakan *inner arc* di sebelah selatannya, dan deretan Pegunungan Tengah yang merupakan tepi dari *The Australian Continent*. Di bawah bentangan pegunungan-pegunungan di Papua, terjadi pertemuan lempeng bumi dari Asia dengan lempeng bumi dari Australia. Karena adanya pertemuan lempeng bumi tersebut, maka tidaklah mengherankan bila Papua memiliki potensi alam di bidang pertambangan yang besar, antara lain, emas, tembaga dan perak, yang penyebarannya berada di sekitar daerah Papua Tengah ke arah timur, sementara minyak bumi lebih banyak berada di kawasan Kepala Burung.

2.1.2 Demografi

Penduduk pribumi Papua adalah rumpun bangsa Papua-Melanesia yang bermukim di daerah Melanesia, yakni sekelompok pulau yang berada di sebelah timur laut Australia, yang terdiri dari Kepulauan Bismark, Solomon, Santa Cruz, New Hebriden, Fiji, Lusiade, dan New Caledonia.

Tabel 1
Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk di Papua

No	Kabupaten/Kota	Luas Daerah (Km2)	Jumlah Penduduk
01.	Merauke	119.749	336.376
02.	Jayawijaya	52.196	431.338
03.	Jayapura	61.493	184.606
04.	Paniai	15.563	137.569
05.	Puncak Jaya	14.532	99.764
06.	Nabire	10.247	86.054
07.	Fak-Fak	28.488	85.626
08.	Mimika	19.592	110.522
09.	Sorong	37.579	147.325
10.	Manokwari	37.901	212.233
11.	Yapen Waropen	18.746	84.130
12.	Biak Numfor	3.130	115.798
13.	Kota Jayapura	940	181.732
14.	Kota Sorong	1.105	174.714
	Jumlah	421.981	2.576.822

Sumber: Papua Dalam Angka 2007

Total penduduk Papua diatas hanyalah 1% dari keseluruhan jumlah penduduk Indonesia, di mana 70% tinggal di daerah pedesaan, di tengah pegunungan yang terpencil dan hutan belantara. Selain kaya akan sumber daya alam, Papua juga memiliki keragaman budaya. Terdapat lebih dari 250 kelompok etnis dengan kebiasaan-kebiasaan, bahasa-bahasa, praktek-praktek dan agama asli yang berbeda di Papua. Ditambah lagi ada 100 kelompok etnis non-Papua. Dengan kondisi tersebut dan pengaruh kesukuan yang sangat kuat, maka dapat di

pahami kalau Papua sering terjadi gesekan-gesekan sosial dengan kondisi keberagaman norma dan nilai-nilai yang ada dalam Papua.

2.1.3 Topografi

Topografi daerah Papua sangat bervariasi. Bagian Selatan terdiri atas daratan rendah dan rawa yang ditutupi hutan bakau dan sagu dengan kerapatan sedang sampai tinggi. Pada bagian Tengah dan Utara terdiri atas pegunungan yang memanjang dari Timur ke Barat, meliputi Kabupaten Jayapura (Pegunungan Cyclop), Kabupaten Manokwari (Pegunungan Arfak), Kabupaten Jayawijaya (Pegunungan Jayawijaya) serta Kabupaten Fakfak dengan Pegunungan Kaimana. Terdapat tiga puncak gunung tertinggi di Papua, yakni Puncak Jaya (5.030 m), Puncak Trikora (4.160 m) dan Puncak Yamin (5.100 m) di atas permukaan laut.

2.2 GERAKAN SEPARATISME PAPUA ERA ORDE BARU

Sebenarnya, benih-benih separatisme ini telah di tanam oleh pemerintah kolonial Belanda jauh sebelum masa orde baru, yakni ketika Belanda berusaha menjadikan wilayah yang dinamainya *Nederlands Nieuw Guinea* ini menjadi sebuah negara sendiri. Keinginan ini diwujudkan dengan dibentuknya Dewan Papua (*Nieuw Guinea Raad*) yang kemudian disahkan pemerintah kolonial. Selanjutnya, Komite Nasional yang beranggotakan 21 orang mengadakan pertemuan yang di hadiri oleh 70 orang Papua lainnya yang menghasilkan lagu kebangsaan, nama bangsa, nama negara, serta bendera Bintang Kejora yang setelah dapat persetujuan Belanda, di kibarkan pada 1 Desember 1961.³⁷

Wujud nasionalisme sempit pada era orde baru terlihat dari adanya penilaian di kalangan masyarakat Papua bahwa tidak adanya prinsip meritokrasi di dalam jajaran Pemerintah Provinsi Papua, dimana posisi strategis di dalam struktur pemerintahan daerah cenderung di dominasi oleh etnis Papua tertentu saja. Masalah nasionalisme sempit ini melebar, bila dikaitkan dengan sikap kecurigaan masyarakat Papua terhadap etnis-etnis pendatang non-Papua. Kondisi ini ditambah dengan adanya interaksi yang terkadang tidak harmonis dengan etnis Papua, sehingga semakin memperlebar kesenjangan yang terjadi di Papua.

³⁷ Ditlanstra, Ditjen Strahan, *Ketahanan Wilayah Papua*, Jakarta, 2006, h.31

Kegagalan pemberdayaan masyarakat Papua, khususnya kegagalan pemerintah dalam menjamin bahwa daerah yang kaya akan menghasilkan masyarakat yang sejahtera, telah menumbuhkan kesadaran kolektif atas identitas primordial masyarakat Papua. Masyarakat Papua melihat bahwa pemerintah hanya memerlukan sumber daya alam Papua belaka. Kondisi ini membuat terjadinya penguatan dalam memori kolektif masyarakat Papua atas *Melanesian Brotherhood* yang secara alamiah sudah ada. Hal demikian pada akhirnya memperkuat hasrat untuk memisahkan diri dari NKRI.

2.2.1 Organisasi Papua Merdeka (OPM)

Nama Organisasi Papua Merdeka atau OPM adalah nama yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada setiap organisasi atau faksi baik di Papua maupun di luar negeri yang dipimpin oleh putra-putra Papua yang pada mulanya bergerak di bawah tanah untuk menyusun kekuatan melawan pemerintahan Indonesia, baik secara politik maupun secara fisik bersenjata dengan tujuan untuk memisahkan atau memerdekakan Papua lepas dari NKRI.³⁸

Awal dari gerakan OPM menurut Aditjondro (2000) adalah serangan sekelompok orang dari suku Arfak ke barak pasukan Batalyon 751 (Brawijaya) di Manokwari pada tanggal 28 Juli 1965.³⁹ Gerakan ini dipimpin oleh Sersan Mayor Parmenas Ferry Awon, yang merupakan bekas anggota Batalyon Sukarelawan Papua (PVK atau *Papoea Vrijwilligers Korp*) bentukan Belanda. Penyerangan ini dipicu oleh penolakan para anggota PVK Batalyon Papua dari suku Arfak dan Biak yang hendak di mobilisasi.

Pemberontakan OPM ini kemudian meluas ke sejumlah Kabupaten di Irian Jaya seperti Biak Numfor, Sorong, Paniai, Fakfak, Yapen Waropen, Merauke, Jayawijaya dan Jayapura. Aksi pemberontakan ini ditandai oleh tindakan perlawanan fisik dengan menggunakan senjata, penyanderaan, demonstrasi, pengibaran bendera Papua Barat, penyebaran dan penempelan

³⁸ Hasil wawancara dengan Terianus Aronggear, SE (Ketum OPM) dalam RG Djopari, "Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka; Suatu Studi Kasus Tentang Integrasi Politik di Irian Jaya dari tahun 1964-1984", (Jakarta, Tesis Universitas Indonesia, 1991), h.145

³⁹ George Junus Aditjondro, *Cahaya Bintang Kejora; Papua dalam Kajian Sejarah, Budaya, Ekonomi dan HAM*, (Jakarta, Elsham, 2000), h.35

pamphlet, serta berbagai aksi perusakan. Aksi-aksi ini menyebabkan tingginya perlintasan di wilayah perbatasan menuju Papua Nugini.⁴⁰

Dalam penelitiannya tentang pemberontakan OPM, Djopari lebih lanjut menyebutkan bahwa lintas batas yang disebabkan adanya eskalasi ancaman gerakan separatis memuncak di tahun 1984, hingga mencapai 11.000 pengungsi. Para pengungsi tersebut digiring oleh OPM dari wilayah Mindiptana, Woropko (Kabupaten Merauke) sebanyak 7.640 orang dan dari Jayapura sebanyak 3.360 orang.⁴¹ Mereka ditampung dalam kamp-kamp pengungsi di Vanimo yang dikenal dengan *Black Water* dan *Black Wara* dan Kamp di Bewani. Mereka memanfaatkan kelemahan kontrol perbatasan yang dimiliki oleh tentara Indonesia baik di laut dan di darat. Perahu nelayan adalah salah satu alat yang dipakai untuk membawa para pengungsi melalui jalur laut.

Dalam perkembangan selanjutnya, OPM berkembang menjadi sebuah organisasi yang menginginkan pemisahan diri dari NKRI. OPM berevolusi menjadi gerakan separatis yang sedikit lebih terorganisir, walaupun sesungguhnya OPM cenderung bersifat sporadis dalam pergerakannya, yang hingga kini menjadi ciri khas pergerakan organisasi tersebut.

Dalam mencapai tujuannya, yakni kemerdekaan Papua, kegiatan OPM dibagi atas kegiatan politik dan militer. Kegiatan politik dilakukan di dalam dan luar negeri, namun bila dibandingkan dengan gerakan separatis lainnya, kegiatan politik OPM di dalam tidaklah seefektif kegiatan di luar negeri. Hal ini karena pengawasan secara terus-menerus dari pihak militer dan intelejen yang menyulitkan anggota OPM di dalam negeri. Untuk kegiatan militer, OPM bergerak di bawah komando Tentara Nasional Papua (TNP) yang dibantu oleh *Papua Intelligence Service* (PIS), yang bertugas melaksanakan kegiatan memata-matai para pendatang, kegiatan tentara dan pejabat setempat.

Lebih lanjut, Dinas Sejarah Militer Kodam XVII Cenderawasih mengklasifikasikan faktor penyebab pemberontakan OPM kedalam lima aspek⁴², *Pertama*, aspek politik. Pada masa pemerintahan Belanda, dijanjikan pada masyarakat Papua untuk mendirikan suatu negara (boneka) Papua yang terlepas

⁴⁰ John RG Djopari, *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*, (Jakarta, Grasindo, 2003), h.1-2

⁴¹ *Ibid*, h.131-132

⁴² Dinas Sejarah Militer Kodam XVII Cenderawasih, (Jayapura, Praja Ghupta Vira, 1971), h.123

dari NKRI. Beberapa pemimpin putera daerah yang pro-Belanda mengharapkan akan mendapatkan kedudukan yang baik dalam negara Papua tersebut. Kekecewaan mulai muncul disebabkan ingkarnya pemerintah Belanda terhadap janjinya, dengan menyerahkan Papua kedalam Indonesia melalui *New York Agreement* 1962.

Kedua, aspek ekonomis. Awal tahun 1964, perekonomian Indonesia sangat terpuruk dan memberikan pengaruhnya yang besar di Papua. Distribusi kebutuhan pangan dan sandang ke Papua macet dan sering terlambat. Akibatnya Irian Jaya pada waktu itu mengalami kekurangan pangan dan sandang. Keadaan ini tidak pernah dialami oleh rakyat Irian Jaya pada masa penjajahan pemerintahan Belanda.

Ketiga, aspek psikologis. Tingkat SDM rakyat Irian Jaya pada masa itu sangat rendah, bahkan mayoritas rakyat di bagian pedalaman tidak pernah mengenal pendidikan, sehingga mereka kurang berpikir secara kritis. Hal ini menyebabkan mereka mudah dipengaruhi oleh emosi daripada pikiran kritis dan sehat dalam menghadapi suatu permasalahan.

Keempat, aspek sosial. Pada masa Belanda para pejabat pemerintah lokal di Irian Jaya umumnya diangkat dari kalangan kepala suku. Kalau mereka memberontak, maka mereka mendapat dukungan dan pengaruh dari sukunya.

Kelima, aspek ideologis. Rakyat Irian Jaya mempercayai adanya mitos dan kepercayaan tentang seorang pemimpin besar sebagai Ratu Adil yang mampu membawa masyarakatnya kepada kehidupan yang lebih baik atau makmur.

Berdasar pada uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gerakan pemberontakan OPM terjadi karena ketidakpuasan terhadap keadaan, kekecewaan yang telah tumbuh menjadi suatu kesadaran nasionalisme Irian Jaya (baca; Papua) pada waktu itu.

2.2.2 Pemberontakan OPM

Gerakan pemberontakan OPM ini berupa perlawanan fisik bersenjata atau aksi militer yang dilakukan secara sporadis, aksi penyanderaan, demonstrasi massa, penyebaran pamflet, gerakan pengibaran bendera, aksi rapat-rapat politik dan pembentukan organisasi perjuangan lokal, aksi pelintasan perbatasan ke

Papua New Guinea, serta aksi pembongkaran dan pengrusakan. Berikut ini uraian beberapa gerakan pemberontakan OPM selama masa Orde Baru

Peristiwa Manokwari

Pemberontakan yang pecah pertama kali di Manokwari adalah di distrik Kebar, yakni pada tanggal 26 Juli 1965 pada saat Upacara Bendera "Sumpah Prasetya" yang diikuti oleh anggota PUTERPRA, pegawai kehutanan dan pertanian setempat. OPM melakukan serangan bersenjata terhadap para peserta upacara dan menewaskan 3 anggota PUTERPRA. Setelah melakukan serangan, gerombolan pasukan OPM tersebut melarikan diri masuk ke hutan dengan merampas 4 pucuk SMG, 1 pucuk Garand dari PUTERPRA, 3 pucuk mauser dari kepolisian serta 1 pucuk cis dari pegawai kehutanan.⁴³

Peristiwa Pos Irai di Anggi

Pada tanggal 4 Maret 1968, gerombolan OPM pimpinan Joseph Indey menyerang pos kompi III 314 Siliwangi. Pertempuran berlangsung selama 3 hari secara sporadis di daerah Irai Anggi. Dalam serangannya tersebut, gerombolan OPM mampu menewaskan 5 orang tentara Indonesia dan kemudian berhasil melarikan diri jauh setelah didesak oleh tentara Indonesia.⁴⁴

Peristiwa Biak Utara dan Biak Barat

Pada pertengahan tahun 1968 terjadi pemberontakan OPM dengan menyerang pos ABRI di Korem dan pos lainnya di wilayah Biak Utara. Di Biak bendera OPM dikibarkan pada umumnya di hutan dan di atas gunung yang digunakan sebagai markas pasukan OPM, baik di Biak Barat maupun di Biak Utara.⁴⁵

Peristiwa Jayawijaya

Pemberontakan OPM di Jayawijaya diwarnai dengan gerakan penyerangan pos pemerintah dan pos Gereja Kristen Injil (GKI) pada tahun 1977-1978. OPM juga menyerang pos militer dan ABRI, serta menutup lapangan

⁴³ Dinas Sejarah Militer Kodam XVII Cenderawasih, Jayapura, Praja Ghupta Vira, 1971, h.125-126

⁴⁴ *Ibid*, h.150

⁴⁵ *Ibid*, h.239-243

terbang Makki dan Petriver yang menelan cukup banyak korban di pihak ABRI, OPM dan rakyat.⁴⁶

Selanjutnya tahun 1980, OPM juga melakukan pengibaran bendera di depan Kantor Gubernur Tingkat I Irian Jaya yang dipimpin oleh Maria Jakadewa dan bendera itu sempat berkibar 30 menit sebelum diturunkan oleh patroli polisi. Kemudian OPM juga membuat petisi yang ditandatangani oleh 50 anggotanya yang berisi tiga butir pernyataan; *pertama*, protes terhadap penyelenggaraan *Act of Free Choice* tahun 1969 dimana seharusnya dilakukan pemungutan suara bagi seluruh rakyat (*one man one vote*), bukan dengan musyawarah dewan. *Kedua*, suatu pernyataan dukungan terhadap perjuangan untuk kemerdekaan Papua Barat. *Ketiga*, seruan kepada pemerintah Indonesia untuk mengakui kemerdekaan rakyat Papua Barat.⁴⁷

Peristiwa Pos Makbon

Pada tanggal 21 Januari 1968, pasukan OPM yang berjumlah sekitar 150an orang, menyerang Pos Makbon yang berkekuatan 8 orang Angkatan Darat. Gerombolan OPM ini dipimpin oleh Daniel Wanma, Zadrak dan T.M. Osok. Aksi ini menewaskan 2 dari 8 orang yang berada di Pos Makbon. Karena bantuan pasukan pada waktu itu lambat, maka gerombolan OPM tersebut melarikan diri ke hutan yang dijadikan basis pergerakannya.⁴⁸

Dari berbagai peristiwa diatas, dapat dilihat bahwa eksistensi gerakan separatis di Papua sangat kuat. Operasi-operasi militer tidak membuat semangat kaum separatis luntur dalam melakukan aksinya. Berbagai program pembangunan dan pemberdayaan dari pemerintah Indonesia tidak mengurangi semangat kaum separatis untuk merdeka. Maka hal yang menjadi pertanyaan dan perlu pendalaman adalah mengapa gerakan separatisme itu masih tetap hidup sepanjang zaman dan melakukan aksinya.

Salah satu jawaban yang akan diangkat dalam pembahasan ini adalah kondisi geografi Papua yang terbuka yang ikut mempengaruhi dinamika gerakan

⁴⁶ Carmel Budiardjo dan Liem Sioe Liong, *West Papua; The Obiliteration of a People*, (London, 1988), h.119-124

⁴⁷ *Ibid*, h.89

⁴⁸ *Ibid*, h. 146

separatis di Papua. Dengan keadaan geografi terbuka yang berhubungan dengan kemampuan kontrol negara dalam pengawasan wilayah (baik darat, laut maupun udara) membuat kaum separatis lebih leluasa dalam melakukan aksi-aksinya. Hal ini bisa dilihat dari setiap aksi kaum separatis bersenjata yang sulit ditumpas oleh tentara Indonesia karena mereka lari ke hutan-hutan dan daerah pegunungan setelah melakukan aksinya. Pegunungan Bintan, misalnya, sangat rawan dijadikan basis gerakan separatis OPM. Letak wilayah-wilayah pedalaman di kabupaten ini sulit diawasi oleh aparat keamanan Indonesia, telah menyebabkan sulitnya juga kawasan disana di kontrol keamanannya. Sehingga logis, kawasan dimaksud menjadi ideal yang dijadikan basis gerakan separatis OPM dan ideal bagi mobilitas gerakan mereka.

2.3 GERAKAN SEPARATIS ERA REFORMASI

Sejak awal digulirkannya reformasi, tampak berkembang euphoria yang berlebihan. Kebebasan cenderung diartikan sebebaskan-bebasnya menyampaikan pendapat tanpa memikirkan kepentingan umum dan kepentingan orang lain, sehingga dapat menyulut terjadinya gejolak baik dalam bentuk demonstrasi brutal dan kerusuhan massa lain yang mengakibatkan jatuhnya banyak korban jiwa dan harta benda.

Ketika reformasi politik terjadi, perubahan politik juga muncul di Papua. Rakyat Papua yang hidup dalam ketakutan selama bertahun-tahun mulai menampakkan keberaniannya. Hal itu ditandai oleh peristiwa demonstrasi besar-besaran dan pengibaran bendera Bintang Kejora di beberapa kota, yang diawali di Blakjuli pada 1998, kemudian menjalar ke beberapa kota seperti Sorong, Timika, Merauke, Nabire, Wamine dan Jayapura. Demonstrasi di era reformasi ini menunjukkan simbolisasi identitas kepapuaan yang dipertunjukkan secara terbuka di perkotaan dengan aktor-aktor yang baru.

Beragamnya aktor ini terlihat dari kian banyaknya kelompok-kelompok yang menyatakan tuntutan kemerdekaan, seperti Presidium Dewan Papua (PDP), Aliansi Mahasiswa Papua serta Tokoh Agama dan Adat. Selain itu, gerak dari aktor semakin terbuka seiring dengan terbukanya era reformasi di Indonesia. Dengan melihat gejala ini, maka OPM bukan lagi satu-satunya aktor yang

menuntut kemerdekaan Papua dari Indonesia. Pola gerakan juga mulai berubah, yaitu dari tertutup dan bersenjata di hutan-hutan, berkembang ke gerakan yang bersifat terbuka dan diplomatis.⁴⁹

Dalam perkembangan ini, peranan Presidium Dewan Papua (PDP) menjadi penting sebagai "*pemain*" baru dalam kemerdekaan Papua. PDP dibentuk melalui Kongres Rakyat Papua II dengan menunjuk Theis Hiyo Eluay sebagai ketua dan Tom Beanal sebagai wakil ketua. PDP membuka ruang politik yang lebih luas bagi aspirasi merdeka di Papua.

2.3.1 Presidium Dewan Papua (PDP)

Mubes Rakyat Papua II tahun 2000 di Sentani merupakan langkah untuk meyakinkan rakyat Papua atas hak kedaulatan rakyatnya sebagai bangsa yang pernah dimulai 1 Desember 1961 namun dicopot oleh bangsa Indonesia. Mubes ini merupakan bentuk perjuangan damai dan demokratis untuk pengembalian hak kemerdekaan. Adapun tiga agenda besarnya adalah; pelurusan sejarah, penyusunan agenda politik dan pemantapan gerakan melalui pembentukan organisasi yang kemudian dinamakan Presidium Dewan Papua (PDP).⁵⁰

Mubes berlangsung dari tanggal 23-26 Pebruari 2000 di Hotel Sentani Indah dengan melibatkan kelompok masa lalu masyarakat (kelompok adat, tapol/napol, agama, kelompok profesi, pemuda, perempuan, mahasiswa, pengungsi, kelompok intelektual dan kelompok-kelompok lainnya). Sejak Mubes, mereka disebut sebagai para kandidat Presidium Dewan Papua (PDP). Upaya melibatkan seluruh pilar perjuangan ini sangat baik dan memberikan dua makna; pertama, tidak ada kelompok yang merasa ditinggalkan, kedua, kesan representatif rakyat Papua dalam Presidium Dewan Papua (PDP) sangat kuat.

Sebagai kelanjutan dari Mubes diatas, dilaksanakanlah Kongres Rakyat Papua II yang menghasilkan sejumlah ketetapan penting, yakni; pengukuhan anggota PDP, pelurusan sejarah Papua, agenda politik Papua, konsolidasi komponen Papua serta manifesto hak-hak dasar rakyat Papua.

⁴⁹ Amiruddin al Rahab, *Heboh Papua; Perang Rahasia, Trauma dan Separatisme*, (Jayapura, Komunitas Bambu, 2010), h.29

⁵⁰ Mubes Papua 2000, '*Seri Pendidikan Politik Papua*' No.3 (Jayapura; Sekretariat Presidium Dewan Papua dan Biro Penelitian STFT Fajar Timur, 2002, h.42)

Sebagai mandataris rakyat dalam Kongres Rakyat Papua ke II, maka tugas PDP kemudian untuk melaksanakan amanat dari keputusan kongres rakyat tersebut, seperti misalnya melakukan upaya sosialisasi politik di dalam negeri, pelaksanaan agenda rekonstruksi PEPERA di seluruh kabupaten di tanah Papua.

Konsolidasi sebagai hasil Kongres diatas, juga diimplementasikan dalam level internasional, diantaranya adalah; melakukan lobi ke Kongres AS dan mengangkat perwakilan Papua Barat di New York, menandatangani MoU (nota kesepahaman) dengan Presiden Partai Buruh Australia Greg Sword, membuka kantor perwakilan Papua Barat di Australia. Dengan demikian, gerakan politis PDP tidak hanya berjalan di dalam negeri, tetapi juga melakukan ekspansi sampai pada lobi politik tingkat tinggi pada beberapa negara lain, termasuk Australia.

Perjuangan damai rakyat Papua melalui PDP, telah menentukan bentuk dan caranya yakni melalui perjuangan damai menghindari kekerasan melalui upaya gelarnya dialog nasional dan internasional. Hal ini sejalan dengan hasil rekomendasi Ketetapan Kongres yaitu berupaya melaksanakan dialog nasional dan internasional.

Dengan demikian, PDP mulai mendapat perhatian besar dari dunia luar, rancangan strategi politik yang dibangun dan pengelolaan isu-isu politik serta upaya mencari dukungan sangat efektif, sehingga tidak heran kalau posisi Indonesia semakin terjepit. Hal ini bisa dilihat pada pengiriman surat resmi kepada Presiden Clinton pada waktu itu, oleh beberapa anggota Kongres Amerika, yang intinya agar pemerintahan melihat kembali keterlibatan Amerika dalam proses PEPERA, serta mengakui adanya pelanggaran pelaksanaan PEPERA yang tidak sesuai dengan sistem jajak pendapat pada tahun 1969 tersebut. Pengiriman surat resmi ini terjadi pasca pelaksanaan agenda Kongres Rakyat Papua

2.4 ESKALASI GERAKAN SEPARATISME DI PAPUA

2.4.1 Implikasi migrasi ilegal terhadap gerakan separatis

Pada Juli tahun 2000, ELSHAM melaporkan bahwa terdapat 100 pemuda yang berasal dari Ceram, Maluku melakukan migrasi ke Papua dengan membawa senjata ringan dan molotov.⁵¹

⁵¹ *Kompas*, 27 Juli 2000 “*Pengungsi Maluku Latihan Perang di Sorong*”

Lebih lanjut, Amnesty International juga melaporkan pada akhir tahun 2000, sekitar 300 anggota Laskar Jihad bersenjata yang telah berkonflik di Maluku, melakukan migrasi ke Papua dengan tujuan dakwah. Ja'far Umar Thalib (pimpinan Laskar Jihad) mengakui, bahwa dia telah mengirim ratusan anggotanya ke Papua. Asumsi mereka adalah adanya konspirasi Kristen di wilayah timur Indonesia, termasuk Maluku dan Papua, untuk memisahkan diri dari Indonesia dan membentuk sebuah negara Kristen.

Banyak orang Papua percaya bahwa konflik Maluku telah merembet ke tanah Papua, yang berpretensi menjadi konflik komunal. Sehingga dengan demikian, akan meningkatkan eskalasi gerakan separatis di Papua. Gerakan Papua Merdeka akan memukul genderang Perang Salib dengan cara mulai menteror orang muslim disana, sampai pada akhirnya bulan Oktober 2002, Laskar Jihad secara resmi dibubarkan oleh Pemerintah Indonesia.

Pada awal tahun 2006, migrasi ilegal juga dilakukan oleh 43 warga Papua yang menggunakan perahu untuk berlayar ke Australia. Mereka terdiri atas 30 orang laki-laki, 6 perempuan dan 7 anak-anak yang berkewarganegaraan Indonesia dan berasal dari Papua. Mereka bertolak dari Merauke berlayar selama lima hari dan akhirnya mendarat di pantai terpencil Cape York di Australia timur laut. Tujuan pelayaran tersebut adalah untuk mendapatkan perlindungan atau yang lazim disebut sebagai suaka dari Pemerintah Australia. Alasan yang diajukan adalah hilangnya rasa aman, sebab ketika memadamkan gerakan separatis, militer Indonesia melakukan aksi genosida di Papua.⁵²

Secara fisik, mereka memanfaatkan kelemahan pengawasan perairan Indonesia, dan secara politik, mereka mendukung gerakan pro kemerdekaan bagi rakyat Papua, karena dengan tindakannya akan menjadi sorotan dunia internasional bahwa di Papua terjadi pelanggaran HAM berat. Hal ini diamini oleh pemerintah Australia, melalui Departemen Imigrasinya (DIMIA) yang memberikan visa tinggal sementara (*Temporary Protection Visa*) kepada 42 dari 43 WNI asal Papua tersebut.

Keputusan pemerintah Australia tersebut membuat sikap protes dan kecewa pemerintah Indonesia, yakni dengan memanggil pulang Duta Besar RI di

⁵² *Kompas*, 24-03-2006 "Visa Australia dan Penanganan Papua", diakses tanggal 23 Maret 2010 <http://kompas.com/utama/news/0603/24/183213.htm>

Australia Hamzah Thayeb untuk berkonsultasi mengenai kebijakan pemerintah Australia tersebut. Namun demikian, PM Australia dengan tegas menyatakan tidak akan mencabut keputusan yang berkaitan dengan pemberian suaka ini. Lebih lanjut, pemerintah Australia mengakui sensitivitas masalah Papua di dalam negeri Indonesia.

Dari rangkaian data diatas, dapat dilihat bahwa migrasi ilegal yang dilakukan oleh anggota Laskar Jihad dan para migran lainnya, berdampak pada eskalasi gerakan separatisme di Papua. Mereka melakukan migrasi dengan memanfaatkan kelemahan pengawasan perairan Indonesia

2.4.2 Eskalasi gerakan separatis bersenjata di Papua

Berikut akan dipaparkan serangkaian aksi yang membuktikan adanya peningkatan kapasitas bersenjata dari kelompok yang di duga OPM.

Peristiwa di Tingginambut, Puncak Jaya. Serangkaian aksi kelompok bersenjata sudah beraksi sejak Agustus 2008. Mereka mengibarkan bendera, melancarkan serangan bersenjata ke pos polisi dan menyergap sejumlah patroli polisi. Sejak awal Januari 2009, tercatat sudah tujuh kasus penyerangan yang dilakukan kelompok yang diduga OPM di kawasan Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, baik kepada pos polisi, maupun pos TNI.⁵³ Terakhir adalah aksi penghadangan terhadap rombongan Kasat Brimob Papua ketika hendak meninjau daerah tersebut. Dalam peristiwa itu, dua anggota Brimob tewas tertembak.

Kemudian, Juli 2009, misalnya, media massa melaporkan aktifitas kelompok yang diduga OPM menyerang areal PT. Freeport di Tembagapura, Mimika. Polisi gagal menghentikan aksi bersenjata yang berlangsung lebih dari tiga pekan, sehingga peristiwa tersebut menarik perhatian nasional. Dalam aksi itu, tiga orang tewas, dua karyawan PT. Freeport dan satu anggota Polri.⁵⁴ Panglima TNI dan Kapolri menduga kuat adanya indikasi keterlibatan OPM dalam aksi tersebut,

⁵³ Amiruddin al-Rahab, *Heboh Papua; Perang Rahasia, Trauma dan Separatisme*, (Jakarta, Komunitas Bambu), 2010, h.5

⁵⁴ Cepos, "Penyerangan OPM ke Freeport", 14 Juli 2009

Selanjutnya, peristiwa di Kampung Wemby, Kabupaten Keerom, pada 25 Juli 2009.⁵⁵ Lamberth Meukiki yang mengaku Panglima TPN-OPM wilayah Keerom mengibarkan bendera Bintang Kejora yang dikawal oleh kelompok bersenjata. Mereka menggugat keaabsahan Papua menjadi bagian dari Indonesia. Aksi Lamberth berjalan mulus, sampai ia menurunkan bendera dan menghilang ke hutan.

Gerakan kelompok bersenjata yang diduga OPM juga meluas sampai daerah Serui, Yapen Waropen, sebuah daerah yang terkenal basis pendukung Indonesia. Saat ini diduga di wilayah Serui telah beroperasi kelompok bersenjata dengan persenjataan cukup baik. Mereka memiliki mortir dan granat. Kelompok Serui pimpinan Erick Manitori bahkan bisa mengimbangi kekuatan patroli Polres Serui.⁵⁶ Polisi pernah menyita sejumlah alat bukti dari kelompok Serui ini, antara lain, empat senjata api laras panjang, satu pistol rakitan, delapan butir amunisi SS1, tiga butir amunisi LE, tiga butir amunisi moser dan dua butir amunisi revolver.⁵⁷

Dari rangkaian aksi bersenjata yang diduga dari kelompok OPM diatas, menunjukkan bahwa, *pertama*, telah terjadi pendalaman dan perluasan gerakan memperjuangkan kemerdekaan Papua sekarang ini. Wilayah aksinya melebar mulai dari Keerom di perbatasan, Puncak Jaya di Pegunungan Tengah, sampai ke Kasepo dan Serui di pantai utara. *Kedua*, gerakan tersebut menunjukkan adanya eskalasi kapasitas perjuangan bersenjata oleh kelompok separatis. Metode ini diambil karena gerakan demonstrasi di perkotaan oleh masyarakat dan mahasiswa dianggap kurang mampu menekan pemerintahan Indonesia untuk menyelesaikan masalah Papua.

Rangkaian aksi bersenjata diatas sangat erat korelasinya dengan penyelundupan senjata api ilegal di daerah konflik, termasuk juga Papua. Konflik-konflik internal yang terjadi di Aceh, Ambon, Poso, Sampit dan Papua hampir semua menggunakan senjata api yang sumber peredarannya berasal dari pasar-pasar gelap dunia, penyelundupan mayoritas memakai dimensi laut, maupun dari kebocoran dalam negeri (pencurian dari markas TNI dan Polri atau yang dijual

⁵⁵ Suara Pembaruan, "Kali Mur Kampung Wembi Menjadi Saksi Kembalinya OPM", 29 Juli 2009

⁵⁶ *Cepos*, 14 Juli 2009

⁵⁷ *Ibid*

oleh oknum TNI dan Polri ke masyarakat sipil maupun kelompok gerakan separatis).⁵⁸

Sebagai contoh, konflik internal di Ambon yang terjadi sejak Januari 1999 telah memakan korban lebih dari 3.000 orang kehilangan nyawa dan 400.000 menjadi pengungsi.⁵⁹ Adanya fakta jumlah korban dalam konflik yang meningkat secara signifikan tersebut, menimbulkan asumsi bahwa penggunaan senjata ringan dalam konflik-konflik tersebut juga meningkat. Beredarnya senjata-senjata illegal di daerah konflik di Indonesia menunjukkan betapa lemahnya kontrol laut dan pengawasan di perairan Indonesia.

Lebih lanjut Nainggolan dalam penelitiannya menyebutkan bahwa senjata gerakan separatis rawan dimasukkan ke Papua melalui jalur darat dan laut, dengan melalui wilayah Bewani di PNG dan perairan Ambon di wilayah Indonesia. Melalui darat terutama dengan menggunakan jalan-jalan tikus yang sulit dikontrol oleh pasukan patroli.⁶⁰

2.5 NILAI STRATEGIS PAPUA BAGI AUSTRALIA

Dalam faktanya, siapapun yang berkuasa di Australia, akan tetap memandang Indonesia sebagai negara yang penting bagi Australia. Hal ini setidaknya bisa dilihat pada dua segi, yakni, *pertama*, dari segi geografis, Indonesia adalah negara Asia dan merupakan tetangga dekat bagi Australia. Lebih-lebih pada partai Buruh yang berkuasa di Australia. Jika di masa lalu Australia selalu “mencari keamanan dari Asia”, khususnya dengan berpayung pada Inggris dan AS (sebelum dan semenjak PD II), maka sejak Partai Buruh berkuasa di tahun 1984, Australia berupaya “mencari keamanan di dalam Asia”. Yakni dengan mendekatkan diri pada negara-negara di Asia, termasuk Indonesia. Biar bagaimanapun Asia lebih dekat daripada Eropa, penduduk Asia juga lebih banyak dari Eropa. Eropa bagi Australia adalah hubungan historis dan kultural

⁵⁸ Denik Iswardhani, *Isu SALW (Small Arms and Light Weapons) sebagai Isu Keamanan Nasional; Studi Kasus Indonesia*, Jakarta, Thesis, FISIP UI, 2003, h.38

⁵⁹ Philip Jusario Vermonte, “Problematika Peredaran Small Arsms di Kawasan Asia Tenggara; Thailand, Filipina dan Indonesia”, dalam *Analisis CSIS Tahun XXXII/2003* No.1, h.59

⁶⁰ Poltak Partogi Nainggolan, “Masalah Perbatasan Indonesia – Papua New Guinea; Perspektif Keamanan”, *Kajian*, Vol.13 No.4, Desember, 2008, h.612

masa lalu, sedang Asia adalah realitas politik, ekonomi dan pertahanan keamanan sekarang dan masa depan.

Kedua, dilihat dari segi geostrategis, Indonesia merupakan benteng, dan sekaligus bisa menjadi ancaman bagi Australia. Dalam aspek historis, Ikrar menyebutkan bahwa, pada Perang Pasifik, Indonesia dulu masih merupakan wilayah Hindia-Belanda, dan merupakan benteng yang amat penting bagi Australia. Tapi pada tahun 1960-1970an, Indonesia dipandang sebagai ancaman karena dipandang melakukan politik ekspansionis yang agresif.⁶¹ Hal ini tampak pada upaya pengembalian Irian Barat, konfrontasi dengan Malaysia dan integrasi Timor-Timur.

Berdasar keterangan di atas, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Indonesia, khususnya Papua, mempunyai nilai strategis bagi Australia, baik yang berdimensi politik, ekonomi dan keamanan. Nilai strategis secara politik dan keamanan, Australia lebih mudah dalam memberikan pengaruhnya jika Papua lepas dari NKRI, selain itu Papua dianggap sebagai mata rantai yang sangat esensial dalam garis pertahanan Australia. Oleh karena itu, setelah pemerintah Australia berhasil memainkan proses referendum Timor-Timur yang digelar PBB pada masa itu, maka dibentuklah *Task Force Papua* oleh pemerintah Australia, yang diketuai Jenderal Peter Cosgrove, bersama tujuh staf ahli untuk mengkaji permasalahan serta prospek kemerdekaan Papua.⁶²

Nilai strategis secara ekonomi, di Papua potensi mineral logam baik berupa logam mulia maupun logam dasar cukup besar. Mineral logam yang cukup melimpah di Papua diantaranya logam mulia, emas dan perak. Selain itu, terdapat pula deposit logam dasar, yakni tembaga serta logam besi berupa besi laterit, kobalt dan nikel. Deposit emas, perak dan tembaga terdapat dalam jumlah besar di kompleks Pegunungan Tengah, yang meliputi Kabupaten Mimika, Jayawijaya, Puncak Jaya, Puncak, Yahukimo, Pegunungan Bintang dan Lonijaya. Cadangan total emas primer di wilayah ini mencapai 2.878,6 juta ton.

⁶¹ Ikrar Nusa Bhakti, PM Australia John Howard ke Indonesia; *Bisnis Pertahanan Yes, Politik No*, Kolom Edisi XXX, September, 1996

⁶² Syamsul Hadi dan Andi Widjajanto, *Disintegrasi Pasca Orde Baru, Negara, Konflik Lokal dan Dinamika Internasional*, (Jakarta, 2007), h.127-128

Berdasarkan fakta di atas, Australia dengan segala daya dan upayanya sangat berkepentingan terhadap Papua dengan melakukan langkah-langkah stimulasi terhadap gerakan separatisme Papua yang akan diterangkan lebih lanjut dalam sub bab berikut.

2.6 KETERLIBATAN AUSTRALIA DALAM BERBAGAI BENTUK

Australia secara geografis di kelilingi oleh dua samudera, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Garis pantai barat-laut dan utara Australia membentuk perbatasan terdekat dengan kepulauan Indonesia. Garis pantai barat yang menjorok ke Samudera Hindia memberikan posisi penting kepada Australia ditinjau dari hubungannya dengan Afrika, subbenua India dan kawasan Asia Tenggara. Garis pantai timur Australia seluruhnya dikelilingi oleh Samudera Pasifik yang menghubungkan Australia dengan benua Amerika Utara dan Selatan.

Australia juga dapat dipandang sebagai pulau-benua yang dikelilingi dua samudera di ketiga sisinya. Dalam hal ini, posisi Papua dengan pulau-pulau yang berdekatan dengannya membentuk atap bagi garis pantai utaranya. Sisi utara itulah kunci strategis pertahanan Australia, sehingga tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa kepulauan Indonesia memiliki arti penting bagi Australia, utamanya letak Papua yang dianggap sebagai *buffer zone* bagi pertahanan Australia serta memiliki kemungkinan untuk melakukan serangan terhadap Australia lewat Papua. Argumen diatas juga diperkuat oleh hasil penelitian Dr. Evatt (1943) yang menyebutkan bahwa Irian Barat merupakan bagian dari "payung" strategis pulau-pulau yang oleh Australia dipandang penting sekali yang juga merupakan bagian dari lingkungan pengaruhnya yang strategis.⁶³ Oleh karena itu, orang-orang Australia tidak akan toleran terhadap penyerahan kedaulatan oleh pemerintah Belanda pada waktu itu, kepada negara manapun kecuali kepada Australia.

Lebih lanjut, Elisabeth berargumen bahwa posisi Australia terhadap Irian Barat sangat penting karena Australia mempunyai pengaruh politik di

⁶³ George Margarret, *Australia and The Indonesian Revolution*, Melbourne University Press, Victoria, 1980, h.68

kalangan negara-negara Pasifik Selatan.⁶⁴ Karena Australia tidak dapat mengubah geografinya, maka penyerahan kedaulatan kepada Indonesia akan merupakan semacam ancaman, sudah menjadi perkiraan yang tidak pernah diragukan oleh Pemerintah maupun Oposisi. Indonesia dilihat secara politis tampak tidak stabil, secara administrasi kelihatan kacau, dan lemah secara militer. Jikalau Irian Barat di tempatkan dibawah tanggung jawabnya, anggapan selanjutnya ialah bahwa Australia akan kehilangan wilayah itu sebagai benteng garis terdepan. Sebaliknya, wilayah itu akan berubah menjadi pintu masuk yang potensial bagi musuh dari Asia.⁶⁵

Dalam Pemerintahan Koalisi pada waktu itu, Alexander Downer (yang kemudian hari menjadi Menteri Imigrasi) menghimbau kepada pemerintah Indonesia untuk melepaskan Irian, karena Irian dianggap sesuatu yang sangat penting sekali bagi keamanan Australia. Downer menyatakan "Jika Belanda tidak ingin tetap disana, maka kita harus menahannya demi kepentingan rakyat kita"⁶⁶ Pandangan ini juga diamini oleh banyak warga Australia dan beberapa media massa seperti The Sydney Morning Herald tanggal 1 Pebruari 1950, dengan judul "*Indonesia Tidak Punya Hak di Irian*"

Dari beberapa keterangan di atas, tampak nyata bahwa Australia sangat berkepentingan terhadap Papua, sehingga akan mempengaruhi dinamika gerakan separatis Papua yang diperkuat dengan berbagai dukungan para pihak di Australia. Hal ini juga di perkuat oleh Andi Widjajanto dkk (2004) dalam Seminar Hasil Penelitian Kajian Pertahanan LIPI yang menyebutkan bahwa perbedaan cara yang digunakan konflik separatisme dengan konflik komunal dalam *intra-state conflict* adalah adanya dukungan ke luar negeri yang membuka peluang intervensi negara lain bagi konflik separatisme, sedang konflik komunal tidak. Lebih lanjut, dapat di lihat pada tabel.

⁶⁴ Adriana Elisabeth, *Dimensi Internasional Kasus Papua*, dalam Jurnal Penelitian Politik Vol.3 No.1, 2006, h.45

⁶⁵ Susan Critchley, *Hubungan Australia dengan Indonesia; Faktor Geografi Politik dan Strategi Keamanan*, (Jakarta, UI Press, 1995), h.80

⁶⁶ *Ibid*, h.60

Tabel 2
Perbedaan karakter *intra-state conflict*; Separatisme dan Konflik Komunal

Indikator	<i>Intra-State Conflict</i>	
	Separatis	Komunal
Kelompok	Adanya kelompok yang menyebut dirinya sebagai kelompok bersenjata (combatan) secara militer	Sudah ada kelompok yang jelas berhadap-hadapan ada yang bersenjata dan ada yang tidak bersenjata, tapi umumnya menggunakan senjata sebagai alat, namun bukan merupakan combatan sebagai militer
Tingkat ketahanan	Sangat tinggi	Tinggi bila meluas jadi pertentangan yang melibatkan wilayah dan aktor-aktornya
Cara yang digunakan	Provokasi Negoisasi Teror Perang Dukungan ke luar negeri	Provokasi Teror Perang
Agenda	Jelas, merdeka atau memerdekakan diri	Tersembunyi

Berdasar pada keterangan di atas, maka cara yang digunakan kaum separatis Papua adalah salah satunya dengan mencari dukungan ke luar negeri.

2.5.1 Keterlibatan Beberapa Senator di Australia

Pada tahun pertama kemerdekaannya, Indonesia dihadapkan dengan pemberontakan-pemberontakan di Irian yang disponsori oleh Australia dan AS. Kelompok-kelompok subversif ini menerima bantuan senjata yang

diselundupkan lewat jalur laut dan memanfaatkan kelemahan pengawasan maritim Indonesia⁶⁷

Australia seakan tidak rela jika Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Australia takut akan nasionalisme Asia dan ancaman komunis dari utara. Citra ras Australia terhadap ras Asia sebagai suatu massa yang sangat besar, tidak dapat dimengerti dan mengancam. Sampai akhirnya pada tahun 1954, persengketaan wilayah Irian Barat dibawa dalam agenda sidang ke-9 Majelis Umum PBB. Dan pada akhirnya Papua yang terletak di wilayah paling timur dari kesatuan Republik Indonesia masuk dalam NKRI pada tanggal 19 Nopember 1969 melalui resolusi PBB No. 2504. Hal ini sekaligus menjadi pengakuan atas integrasi Papua di Indonesia menurut hukum internasional.⁶⁸

Keterlibatan senator Australia dalam isu separatisme Papua diungkap oleh Arkilaus Baho, Juru Bicara Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat (Front Pepera). Dukungan tersebut datang dari beberapa anggota senat di Australia, yakni berupa dukungan moril dan materiil. Seorang Senator Kerry Nettle, anggota parlemen dari Partai Hijau misalnya, terbukti terlibat dalam memperjuangkan suaka politik bagi 42 warga Papua. Bahkan, pada tanggal 2 April 2006 lalu, Nettle mendapatkan penghargaan “Mahkota Papua” dari kelompok pro-separatis di Sydney.

Selanjutnya, dari Partai Demokrat Australia, Senator Andrew Barlet yang ikut memberikan dukungan bagi kampanye penentuan nasib sendiri (*self determination*) bagi rakyat Papua. Barlet juga pernah mengirimkan surat kepada Sekjen PBB untuk meninjau kembali keabsahan Pepera 1969.

2.5.2 Keterlibatan Aktor Non-Negara Australia

Seiring dengan mengemukanya isu demokratisasi, HAM dan lingkungan di dunia internasional, isu Papua telah mengemuka, khususnya

⁶⁷ Sumber Intelejen yang dibentuk oleh Uni Belanda – Indonesia bulan Maret 1950 dan menerbitkan laporannya pada tanggal 1 Agustus 1950. Lihat *Report of The Committee New Guinea (Irian) 1950*, diterbitkan oleh *Secretariat of The Netherlands – Indonesians Union*

⁶⁸ Yan Pieter Rumbiak, *Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua, Menyelesaikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Membangun Nasionalisme Di Daerah Krisis Integrasi*, (Jakarta, Papua International Education, 2005), hal.36

pada beberapa negara yang memiliki perhatian besar terhadap perkembangan Papua, baik pada tingkat pemerintah, parlemen, maupun pada tingkat masyarakat seperti LSM. Mengemukanya isu Papua di dunia internasional tidak lepas dari kampanye KSP yang di dukung oleh LSM nasional dan internasional.

Fokus kampanye KSP adalah AS, Australia dan kawasan Pasifik. Di AS, yang bersimpati terhadap KSP adalah *The Center for Preventive Action* (CPA) yang berada di bawah *The Council on Foreign Relations* (CFR). Pemerintah AS turut memberikan perhatian khusus terhadap isu Papua, khususnya setelah terjadi penembakan yang menewaskan dua warga negara AS pada 31 Agustus 2002 di Timika.⁶⁹ Kongres AS juga serupa, mengaitkan isu Papua dengan kerjasama pertahanan dalam bentuk *International Military Education Training* (IMET).

Kampanye KSP menjangkau pula Australia sebagai kawasan terdekat dengan wilayah Papua. Intensitas KSP di Australia lebih tinggi frekuensinya di bandingkan dengan kawasan lainnya. Hal ini disebabkan oleh proksimitas geografis, karena banyak pelarian KSP yang bermukim di Australia serta adanya dukungan dari LSM-LSM dan akademisi Australia tertentu. Di sisi lain, Australia sendiri, baik pada tataran pemerintahan dan parlemen maupun tataran publik, dari dulu memiliki perhatian tersendiri terhadap Papua sejak wilayah itu masih dipersengkatakan oleh Indonesia dan Belanda.

Beberapa LSM Australia dikenal dekat dengan KSP, dimana salah satu yang menonjol adalah *Australian People, Health, Education and Development Aid* (APHEDA) yang terang-terangan menyatakan dukungannya terhadap perjuangan KSP. APHEDA merupakan anggota *Australian Council for Overseas Aid* (ACFOA) dengan aktifitas pokok pada perlindungan hak buruh, HAM, kemanusiaan dan pembangunan yang di dukung oleh para tokoh Australia, khususnya anggota Parlemen. APHEDA mendapat donasi dana dari *Australian Aid* (AUSAID), organisasi pemerintah yang berada di bawah naungan *Departement for Foreign Affair and Trade* (DFAT).

⁶⁹ Kedua warga negara AS tersebut adalah Edwin Leon Burgon dan Ricky Lynn. Keduanya bekerja di PT Freeport Indonesia.

Dukungan bagi KSP juga datang dari aktifis *Australian Labour Party* (ALP). Hal ini di tandai dengan penandatanganan kesepakatan dukungan kemerdekaan Papua antara Presiden ALP Greg Sword, dengan perwakilan KSP di Australia, Jacob Rumbiak pada Oktober 2000 di Melbourne. Hal ini seperti dilansir oleh Anggota Komisi I Effendi Simbolon dalam keterangan persnya yang menyebutkan bahwa terdapat agenda penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Direktur Lembaga Study dan Advokasi Hak Asasi Manusia (ELSHAM) Papua, John Rumbiak dengan anggota parlemen tingkat negara Greg Sword dari partai Buruh. Intinya mereka mendukung setiap gerakan separatistis di Papua.⁷⁰

Pada tahun 2003, Bob Brown yang juga seorang senator, bekerjasama dengan organisasi internasional seperti, *Asia Pacific Human Rights Network* (APHRN), *West Papua Action-Australia* (WPA-A), *Australian Council for Overseas Aid* (ACFOA), *East Timor Action Network* (ETAN) untuk mengkampanyekan masuknya beberapa submisi kepada parlemen Australia. Adapun tema yang diangkat adalah pelurusan sejarah Irian Jaya dan penentuan nasib sendiri rakyat Irian Jaya. WPA-A pada tahun 2006 juga terlihat mensponsori pengibaran bendera Bintang Kejora di Sydney yang dihadiri oleh lebih dari 100 orang peserta.

Aktor non-negara berikutnya yang terkait dengan bentuk keterlibatan Australia dalam isu Papua adalah keberadaan lembaga bantuan pembangunan yang dikelola Gereja Katholik Caritas Australia (*The Catholic Agency for Overseas Aid and Development*). Caritas Australia bekerjasama dengan sekitar 154 organisasi di berbagai wilayah dan negara di seluruh dunia. Dalam perjalanannya, lembaga ini pernah mengeluarkan pernyataan resminya yang mendukung secara langsung kemerdekaan Papua serta menanyakan kembali mengenai sejarah dan keabsahan Pepera di Papua.⁷¹

Diungkapkan juga oleh Dubes RI di Australia, Hamzah Thayib, bahwa persekutuan Gereja Australia (*Uniting Church in Australia/UCA*) mendukung kampanye pemisahan Papua dengan menebarkan informasi soal

⁷⁰ <http://www.eramuslim.com/berita/nasional/cetak/parlemen-dan-gereja-australia-diduga-terlibat-upaya-disintegrasi-papua>

⁷¹ Adriana Elisabeth, *Dimensi Internasional Kasus Papua*, (Jakarta, LIPI Press, 2005), h.53

adanya genosida di Papua. Para petinggi atau elit UCA mendapatkan info ini dari jaringan gereja di Papua.

Kemudian terdapat juga lembaga Asosiasi Papua Barat Australia, yang memiliki perhatian besar terhadap Papua dan memiliki jaringan yang tersebar di seluruh Australia, Belanda dan AS. Lembaga ini merupakan lembaga non-politik dan non-agama. Komitmennya adalah mendukung pemberdayaan masyarakat Papua melalui penyebaran informasi di berbagai media massa. Meskipun demikian, dalam kenyataannya lembaga ini tidak sepenuhnya berpegang teguh pada asas organisasi yang non-agama dan non-politik. Dalam kenyataannya lembaga ini berusaha menekan pemerintahan Australia untuk membentuk tim investigasi peristiwa pembunuhan di Timika dan kasus kekerasan di Papua. Kelompok ini juga berusaha membawa persoalan Papua ke lembaga PBB untuk mengkaji masalah Papua secara lebih dalam.⁷²

Berikut ini akan disebutkan juga beberapa data jaringan OPM yang berada di Australia;

1. Australia West Papua Solidarity - Cairns
sciberf@bigpond.com.au
2. Australians for a Free West Papua (Northern Territory)
P.O. Box 2155, Darwin NT 0801
woodsstreet31@hotmail.com atau rwesley@ozemail.com.au
3. Australia West Papua Association – Melbourne
P.O. Box 1093, Windsor 3182
<http://www.freewestpapua.com.au/>
4. Australia West Papua Association – Sydney
P.O. Box 65, Miller Point 2000
www.zulenet.com/awpa/
5. Australia West Papua Association – Perth
www.awpawa.org
6. Australia West Papua Association – Brisbane
www.au.geocities.com/awpab/

⁷² *Ibid*, h.56-57

7. Free West Papua Collective
P.O. Box 2091, Lygon St North, East Brunswick 3057
www.freewestpapua.com.au
8. Australian West Papua Association Central Highlands (Ballarat)
P.O. Box 1743, Ballarat Mail Centre Vic 3353
Tel: (03) 5332 4747 Fax: (03) 9646 8626

Keterlibatan Australia dalam isu Papua juga banyak dimainkan oleh peran media massa, seperti seorang redaktur *New Internationalist Magazine*, Christ Richard banyak memberikan tulisan yang bersifat provokatif, misalnya sebuah tajuk yang berjudul

*“West Papua Rising.
West Papuans want Independence
Indonesians gun them down.
But dead spirits free hearts.”*⁷³

Tulisan di atas menceritakan tentang pelanggaran HAM yang dilakukan oleh tentara Indonesia terkait dengan kematian Theys H. Eluay. Richard memberikan penghargaan kepada almarhum Theys sebagai pahlawan kemerdekaan. Ia juga memberikan semangat kepada masyarakat Papua untuk tetap terus berjuang dalam proses kemerdekaan Papua. Selain itu, Richard juga aktif membantu penyelenggaraan seminar tentang Papua di Australia. Salah satu seminar yang pernah diselenggarakan di Gedung Dewan Serikat Buruh, di Victoria pada Februari 2003 adalah bertajuk *West Papua Features*.

⁷³ <http://www.newint.org/issue344/keynote.htm>